

ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL PROYEK *MASS RAPID TRANSIT* DI DKI JAKARTA

Puji Rahayu

Abstrak

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup. Di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah telah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama pada ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Penelitian mengenai pembangunan Proyek MRT untuk mengetahui pengaturan dan penetapan dalam pembangunan Proyek MRT ditinjau dari aspek Hukum Nasional saat ini dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pembebasan tanah atas proses pembangunan Proyek MRT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan dan penetapan pembangunan Proyek MRT didasari oleh Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah dalam pembangunan Proyek MRT didasari oleh Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah. Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pembebasan tanah dan melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan tugas pokok fungsinya yaitu dengan mengacu kepada peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Ruang Bawah Tanah, Proyek *Mass Rapid Transit*, Tanggung Jawab

ANALYSIS JURIDICAL THE USE AND MANAGEMENT BASEMENT TO THE MASS TRANSPORTATION CONSTRUCTION THE MASS RAPID TRANSIT IN JAKARTA

Puji Rahayu

Abstract

Land are necessary for the basis for every living thing. In Indonesia, especially in urban areas suggests that land use has changed and development, especially in the basement and space the ground. Research on development project to know regulations and the in development project in terms of legal aspects current national and also to know the local government responsibility in terms of eviction over the development project. Research method used in this research is normative law or literature available and sociological research law or empirical. Normative legal research studied literature only material or secondary data. To research law sociological or empirical then who researched is secondary data, then on to continue with the research for the primary data in the field or on the community. Based on the results of research and the determination of arrangement development project constituted by the bylaw number 7 2013 On changes to the bylaw number 3 year 2008 on the formation of regional-owned business (BUMD) limited company (PT) MRT Jakarta and regulations provincial governor of Jakarta number 18 years 2008 About planning control or designation parcel of land to the implementation of development for the interest of common trace the path of rapid transit corridor lebak bulus-dukuh over south Jakarta administration, concerning the utilization and management of land in the development project constituted by article 33 paragraph 3 of the constitution of 1945, the law number 5 1960 about agrarian, the law number 2 2012 on procurement of land for development to public interest and the governor regulation 167 2012 about the cellar. Form the responsibility of the regional government in terms of land acquisition and implement land availability in accordance with the main task of its function namely with reference to legislation and regulation.

Keywords: The Basement, The Mass Rapid Transit, Responsibility